

## Strategi Politik Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kota Tomohon Dalam Rangka Pengembangan Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19

*Nehemia L. Kjongian<sup>1</sup>*

*Agustinus B. Pati<sup>2</sup>*

*Wiesje Wilar<sup>3</sup>*

### Abstrak

Tujuan ini penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi Politik Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kota Tomohon Dalam Rangka Pengembangan Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Pembangunan dihadirkan dengan berbagai latar belakang dan kepentingannya. Kehadiran aktor politik pembangunan menjadi bagian sentral dari politik pembangunan. Dalam sebuah pembangunan, negara adalah salah satu aktor politik pembangunan. Negara sebagai aktor politik pembangunan memiliki kekuasaan untuk melakukan intervensi dalam pembangunan seperti dalam hal administrasi, arbitrase regulasi, pengawasan keuangan, dan tindakan langsung. Untuk menjalankan langkah-langkah tersebut negara sebagai aktor pembangunan biasanya melakukan dengan menggerakkan apa yang disebut birokrasi. (Warjio, 2016:220). Penelitian ini berlokasi di Kota Tomohon, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Politik pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tomohon berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi masyarakat Kota Tomohon, adapun kendala yang dihadapi adalah pandemic covid -19 yang mengakibatkan pergeseran anggaran serta pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah selanjutnya kendala yang dihadapi adalah pergantian walikota dan wakil walikota pada masa pandemic tersebut sehingga arah kebijakan berubah.

***Kata Kunci: : Strategi Politik, Pembangunan, Infrastruktur***

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

<sup>2</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

<sup>3</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

*Sekretariat:*

*Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

## Pendahuluan

Dampak pandemi covid 19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan saja, namun berdampak pada permasalahan lainnya seperti Sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut diakibatkan adanya pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat guna memutus mata rantai covid 19, konsekuensi tersebut dirasakan oleh masyarakat yang bekerja dan juga pengusaha yang berkurang pendapatannya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan guna menyelamatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang dapat digunakan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan anggaran yang ada untuk pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daerahnya.

Dengan ada pandemic covid 19, sangat mempengaruhi sendi kehidupan nasional maupun daerah termasuk pembangunan daerah, dimana banyak anggaran pembangunan yang di alihkan untuk penanganan covid 19. Namun keadaan juga akan semakin memburuk apabila pembangunan daerah dihentikan dan tidak dijalankan dimana efek yang akan ditimbulkan adalah pengembangan daerah akan terhenti dan kesejahteraan masyarakat akan tertunda juga. Pemerintah daerah dengan undang-undang otonomi daerah diberikan keluasaan untuk mengatur pembangunan daerahnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan masing-masing pemimpin daerah terhadap pembangunan berpengaruh terhadap pengembangan daerah termasuk di masa pandemic, strategi yang tepat akan mempengaruhi pengembangan daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pemerintah provinsi, kabupaten dan kota memiliki kepala daerah sebagai kepala pemerintahan. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati dan kepala daerah kota disebut

walikota yang semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Salah satu semangat dari pelaksanaan otonomi daerah di mana rakyat berpartisipasi dalam pelaksanaan kehidupan berdemokrasi. Kota Tomohon sebagai salah satu daerah di Indonesia yang dalam penerapan sistem otonomi daerah telah mendorong terjadinya dinamika kepemimpinan politik di kota tersebut. Rakyat dalam sistem otonomi daerah berhak memilih pemimpin untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini memperlihatkan kenyataan bahwa setidaknya sejumlah pemimpin lokal telah membuktikan keberhasilan mengelola permasalahan kehidupan masyarakat yang terjadi pada daerahnya.

Salah satu fenomenanya adalah pembangunan gedung-gedung perkantoran yang mewah, rumah sakit yang modern, serta perusahaan pabrik yang bertaraf internasional. Selain itu juga didukung dengan infrastuktur pariwisata yang semakin meningkat, sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah Kota Tomohon adalah wilayah yang kecil, jika pemimpinnya hanya bertumpu pada sektor pertanian dan orientasi pada pasar lokal itu tidak akan mungkin mendapatkan pertumbuhan yang cukup tinggi.

Kota Tomohon merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi utara yang memiliki perkembangan pembangunan yang signifikan sejak dimekarkan dari Kabupaten Minahasa tahun 2004, perkembangan daerah tersebut dapat dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, gedung, menara, kawasan perekonomian, rumah sakit, terminal, daerah pariwisata serta kemajuan perekonomiannya. Sumber pendapatan kota Tomohon bersumber dari beberapa bidang utama seperti pertanian dan pariwisata. Kedua bidang tersebut membutuhkan sarana dan prasarana penunjang agar dapat berjalan dengan baik.

Dari pengamatan peneliti dilapangan, sejak adanya pandemic covid 19 pembangunan daerah Kota Tomohon mengalami penurunan akibat pembatasan social dan juga pembatasan anggaran yang

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 4 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

diterapkan dalam rangka menanggulangi dampak covid 19 di daerah. Walikota dan Wakil Walikota Tomohon juga tergolong masih baru dimana baru terpilih dan dilantik sejak tahun 2020, hal tersebut membawa efek positif dan negative dimana efek positifnya, perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan semangat dan strategi yang baru dan negatinya adalah mereka masih akan beradaptasi dengan situasi dan keadaan yang baru.

Strategi politik pembangunan yang tepat akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang Politik Pembangunan di masa pandemic dalam rangka pengembangan daerah yang terjadi di Indonesia terkhusus di Kota Tomohon sebagai daerah dan objek penelitian. Hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk melihat Politik Pembangunan seperti apa yang sesuai dengan segala permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan dimasa depan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus strategi politik pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kota Tomohon pada masa pandemic covid-19 dengan Menurut Warjio (2016:106) politik pembangunan bukan saja mengenai cara atau strategi yang hendak dicapai dalam pembangunan, tetapi juga pemikiran atau ideologi yang termaktub dalam pembangunan dari strategi dan cara yang dijalankan itu yang melibatkan banyak kelompok kepentingan. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menggabungkan dengan teori strategi dari Iman Mulyana (2010:45), dimana menurutnya terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu :

- Kemampuan
- Sumber Daya
- Lingkungan

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Tomohon
- Bappeda Kota Tomohon
- Masyarakat

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah data direduksi

## Pembahasan

Pembangunan daerah memerlukan tenaga yang cukup giat dan kecerdasan yang dimiliki oleh para pemimpinnya sehingga pembangunan yang dilaksanakan berjalan maksimal dan tenaga yang dibutuhkan pula memerlukan mental yang cukup kuat demi membangun bangsa yang tertata, pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar apabila sistem pemerintahannya tidak dibenahi sedemikian rupa. Sebagaimana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan integral dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang

langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kejadian yang menjadi isu strategis merupakan keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak pemerintah dan masyarakat dapat dilihat bahwa pembangunan kota tomohon sejauh ini sudah baik meskipun adanya pergantian kepemimpinan dari walikota serta pergantian rezim partai politik di Kota Tomohon, pembangunan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Namun permasalahan infrastruktur tetap ada dan menjadi bahan perbaikan pemerintah kota tomohon.

Permasalahan infrastuktur sangat kompleks karena terkaitdengan berbagai isu termasuk ketertaikatanya dengan ekonomi, kependudukan, dan globalisasi, peran badan usaha, kesenjangan antar wilayah serta

energi dan lingkungan. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi tidak terlepas dari

ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang secara efisien dan efektif sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan jaringan infrastruktur dan industri jasa penyelenggaraan infrastruktur maupun manufakturnya menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan baik di daerah maupun nasional. Selain mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing global, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Beberapa permasalahan yang dihadapi bidang infrastruktur yang berhubungan langsung dengan ekonomi di Kota Tomohon antara lain rendahnya pertumbuhan pembangunan bidang infrastruktur, pertumbuhan bidang Infrastruktur belum mampu melampaui laju pertumbuhan ekonomi, dan belum meratanya pembangunan prasarana dan sarana.

Permasalahan yang dihadapi bidang infrastruktur dalam menghadapi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang adalah (1) rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap angkutan massal yang murah dan nyaman, terutama masyarakat perkotaan, (2) terbatasnya aksesibilitas wilayah – wilayah terluar Kota Tomohon dalam mengakses prasarana dan sarana infrastruktur, dan(3) pembangunan infrastruktur terbentur dengan permasalahan lahan yang ketersediaannya berkompetisi dengan bidang property (perumahan dan permukiman), (4) masih belum terpenuhinya kebutuhan perumahan dan masih belum tertatanya kawasan yang berpotensi menjadi permukiman kumuh, serta (5) belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih adanya rakyat yang belum memiliki akses terhadap daya listrik.

Permasalahan infrastruktur di Kota Tomohon yang terkait dengan energi dan lingkungan antara lain: (1) diversifikasi, konservasi energi, dan sistem multimoda yang belum optimal; (2) kemacetan di kota-kota besar dan menengah serta rusaknya banyak jaringan jalan di daerah menambah parah dan

buruknya emisi gas buang; serta (3) polusi yang tinggi penyebab utama dari Gas Rumah Kaca (GRK). Infrastruktur khususnya jaringan irigasi diharapkan dapat menjawab tantangan masa depan dalam mewujudkan ketahanan air, termasuk untuk mendukung ketahanan pangan. Isu utama dalam pengelolaan jaringan irigasi di Kota Tomohon adalah makin berkurangnya debit air yang ada didalam mengairi daerah irigasi yang ada. Selain itu juga belum seluruh daerah irigasi dapat diairi dengan baik dan juga jaringan irigasi yang ada sebagian berada dalam kondisi yang kurang baik.

Sebagai bentuk realisasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Tomohon telah menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005–2025. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka berpengaruh terhadap penyusunan rencana pembangunan tahunan di Kota Tomohon Tahun 2018, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah yakni pihak asisten walikota bidang ekonomi dan pembangunan serta informan dari bappeda kota tomohon dapat disimpulkan bahwa pembangunan kota tomohon pada masa pandemic berjalan lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun setelah pandemic mereda pemerintah telah melakukan perencanaan selanjutnya guna membangun

kota tomohon.

## Penutup Kesimpulan

Strategi Politik pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tomohon berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi masyarakat Kota Tomohon, adapun kendala yang dihadapi adalah pandemic covid -19 yang mengakibatkan pergeseran anggaran serta pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah selanjutnya kendala yang dihadapi adalah pergantian walikota dan wakil walikota pada masa pandemic tersebut sehingga arah kebijakan berubah. Namun visi pemerintah yang baru tetap mengedepankan pembangunan baik fisik maupun pembangunan masyarakat. Strategi politik pembangunan tersebut terasa efektif ditengah masa-masa sulit masyarakat menghadapi krisis kesehatan dan juga kesulitan ekonomi.

## Saran

Disarankan agar pemerintah Kota Tomohon, lebih intens dalam mencari investor-investor besar dalam membangun kota Tomohon, investor mall, investor perhotelan dan juga pariwisata sangat penting dalam pembangunan kota tomohon kedepannya, dengan adanya investor, maka pembangunan infrastruktur dapat dengan cepat dicapai dan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar sehingga kota tomohon dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Afrizal, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Edisi ke-2 Rajawali Pers, Jakarta
- Andrew D. J. 2015. *Leadership* (Terjemahan). Edisi Kedua. Prenada Media. Jakarta.
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori-Aplikasi-Strategi*

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 4 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

*dan Komunikasi Politik Indonesia.*

Jakarta PT. Balai Pustaka

Surbakti, Ramlan. 2012. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT Grasindo

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Budiardjo. M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum

Tatom, J.A. 1993. *Paved with Good Intentions; the Mythical National Infrastructure Crisis Policy Analysis.* Cato Institute

Grigg, N. 1988, *Infrastructure Engineering and Management,* John Wiley & Sons.

Imam Mulyana. 2010. *Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua.* Jakarta : Salemba Empat

Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya: Gitamedia Press

Warjio, 2016. *Politik Pembangunan Paradoks, Teori, Aktor Dan Ideologi,* Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri

Jordan, Edwin Norman. 2014. *Strategi Pemasaran Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2012.* Bandar Lampung: Universitas Lampung

Kodotie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumber Lainnya:

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021
- <https://www.kemkes.go.id/>, pedoman pencegahan dan pengendalian covid 19
- Bappenas.go.id

Luh Putu Putri Awandari,I Gst Bgs Indrajaya, "Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja", E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol 5 No 12, Desember 2016

Moleong L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja. Rosdakarya.

Moteff, John, Claudia Copeland and John Fischer. 2003. *Critical Infrastructure : What Makes an Infrastructure Critical ?* Congressional Research Service.

Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prapti, dkk (2015). *Analiksis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonominrakyat di kota semarang.* Dinamika Sosbud

Salusu, J. 2006. *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah.* Cetakan kesepuluh. Jakarta: Prenada

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* Bandung,. Penerbit: Alfabeta,